



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan Kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2023;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Desa (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.

15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan Penghasilan Tetap (SILTAP) Penghulu, Perangkat Kampung, kebutuhan penunjang operasional Kampung, serta tunjangan dan/atau insentif Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dan lembaga kemasyarakatan.
19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, dan rasio indeks kesulitan geografis.
20. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK ditetapkan berdasarkan Indeks Kampung Hijau (IKH).
21. Indeks Kampung Hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah Indeks Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (IPPL) dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (IPEPK).
22. Kampung Hijau adalah Kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi kampung untuk mengetahui besaran alokasi dana kampung yang diterima setiap kampung.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengatur mekanisme penetapan dan perhitungan ADK tahun 2023;
 - b. menetapkan insentif kampung berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah;

BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penetapan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis; dan

- c. kinerja Pemerintah Kampung terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan kampung.

Bagian Kedua Pembagian

Pasal 4

- (1) Pembagian besaran ADK setiap Kampung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Kampung Dasar (AD);
 - b. Alokasi Dana Kampung Proposional (AP); dan
 - c. Alokasi Kinerja (AK).
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dari:
 - a. jumlah penduduk dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. angka kemiskinan dari Dinas Sosial; dan
 - c. luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Alokasi Dana Kampung Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diperhitungkan sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dibagi secara Proposional yang dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :

- a. jumlah penduduk 40% (empat puluh perseratus);
- b. angka kemiskinan 15% (lima belas perseratus);
- c. luas wilayah 15% (lima belas perseratus); dan
- d. indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AP Kampung} = \{(0,40 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AP Kab}$$

Keterangan:

AP Kampung = Alokasi Proposional setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Siak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Siak

Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Siak

Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Siak

AP Kab = Alokasi proposional Kabupaten Siak

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diperhitungkan sebesar 3% (tiga perseratus) berdasarkan IKH.

- (2) IKH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
- (3) Indikator dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekologi.
- (4) Indikator dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekonomi.
- (5) Data untuk menghitung IKH berdasarkan hasil isian mandiri Pemerintah Kampung yang telah diverifikasi oleh tim penilai, dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (6) Formula perhitungan IKH terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Alokasi Kinerja (AK) hanya diberikan kepada Kampung yang mendapatkan skor sama atau lebih tinggi dari 0,2000 secara proporsional dan berkeadilan.
- (8) Pembagian Alokasi Kinerja (AK) untuk setiap Kampung akan diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Rincian Penghitungan ADK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 106

FORMULA
PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH)
KABUPATEN SIAK

- (1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK) dikalikan bobot indeks.
- (2) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKH = \alpha \times IPPL + \beta \times IPEPK$$

Dimana:

IKH	Indeks Kampung Hijau
α dan β	Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
IPPL	Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
IPEPK	Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

- (1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5 indikator;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1)
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya disebut (IPPL 2).
 - c. Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)
 - d. Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 4).
 - e. Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).
- (2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai berikut:

$$IPPL = \alpha \times IPPL\ 1 + \beta \times IPPL\ 2 + \chi \times IPPL\ 3 + \delta \times IPPL\ 4 + \varepsilon \times IPPL\ 5$$

Dimana:

- IPPL : Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks
- IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan lingkungan,
- IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 4 : Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- IPPL 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi		Skor
1. Peraturan Kampung	:	Skor 3
2. Peraturan Penghulu	:	Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)	:	Skor 1

- (5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.
- (6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan		Skor
1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.
- (8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan		Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	:	Skor 2

- (9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan bagian dari IDM (PPL 5) dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

- (1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) terdiri dari 5 indikator sebagai berikut;
- a. Kebijakan/regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
 - c. Inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 - d. Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
 - e. Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).
- (2) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula berikut:

$$IPEPK = \alpha \times IPEPK\ 1 + \beta \times IPEPK\ 2 + \chi \times IPEPK\ 3 + \delta \times IPEPK\ 4 + \varepsilon \times IPEPK\ 5$$

Dimana:

- IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan.
- $\alpha, \beta, \chi, \delta, \varepsilon$: Bobot indeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh persen) masing-masing indeks.
- IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
- IPEPK 4 : Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.
- IPEPK 5 : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun (IDM).

- (3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan perkalian jumlah kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.
- (4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi	Skor
1. Peraturan Kampung	: Skor 3
2. Peraturan Penghulu	: Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, berita acara pemerintahan kampung, dll)	: Skor 1

- (5) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3) dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan kegiatan.
- (6) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan	Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan	: Skor 2

- (7) Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor IKE pada masing-masing kampung.

C. Indeks Kampung Hijau (IKH)

- (1) Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung (IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Kampung\ i} - Nilai_{Kampung\ min})}{Nilai_{Kampung\ max} - Nilai_{Kampung\ min}}$$

- (2) Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum indeks rata-rata Kampung.



BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ADK Min	ADK Pro	ADK ₁	ADK _{interja}	SAKINAH	ADK SETIAP KAMPUNG	Total BAR	JP	JP x R	LW	LW x R	JPM	JPM x R	IKG	IKG x R
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SIAK	LANGKAI	711,056,307	262,802,942	973,859,249	72,351,794		1,046,211,000	0,0079	2,959	0,0033	47,25	0,0009	1301	0,0014	30,86	0,0022
2	SIAK	TUMANG	711,056,307	275,081,331	986,137,637	0		986,138,000	0,0082	4,120	0,0047	11,72	0,0002	1543	0,0017	23,40	0,0017
3	SIAK	MEREMPAN HULU	711,056,307	234,126,684	945,182,991	79,778,147		1,024,961,000	0,0070	2,178	0,0025	61,72	0,0012	1257	0,0014	28,04	0,0020
4	SIAK	RAWANG AIR PUTIH	711,056,307	181,649,392	892,705,699	81,420,277		974,126,000	0,0054	1,288	0,0015	39,08	0,0007	734	0,0008	34,09	0,0024
5	SIAK	SUAK LANJUT	711,056,307	184,380,926	895,437,233	105,562,051		1,000,999,000	0,0055	2,561	0,0029	1,78	0,0000	793	0,0009	24,12	0,0017
6	SIAK	BUANTAN BESAR	711,056,307	288,156,556	999,212,862	93,895,570		1,093,108,000	0,0086	2,399	0,0027	84,21	0,0016	1235	0,0013	41,51	0,0030
7	SUNGAI APIT	TELUK LANUS	711,056,307	550,822,384	1,261,878,690	0		1,261,879,000	0,0165	1,328	0,0015	537,37	0,0102	1251	0,0014	47,97	0,0034
8	SUNGAI APIT	TANJUNG KURAS	711,056,307	250,402,853	961,459,160	62,008,821		1,023,468,000	0,0075	1,613	0,0018	35,17	0,0007	1233	0,0013	51,15	0,0037
9	SUNGAI APIT	PARIT VII	711,056,307	187,052,240	898,108,547	0		898,109,000	0,0056	1,681	0,0019	15,14	0,0003	970	0,0011	32,90	0,0024
10	SUNGAI APIT	TELUK MESJID	711,056,307	308,693,476	1,019,749,783	0	100,000,000	1,119,750,000	0,0092	3,297	0,0037	39,08	0,0007	1877	0,0020	38,12	0,0027
11	SUNGAI APIT	SUNGAI KAYU ARA	711,056,307	273,138,499	984,194,805	0		984,195,000	0,0082	2,133	0,0024	101,09	0,0019	1560	0,0017	30,03	0,0021
12	SUNGAI APIT	LALANG	711,056,307	238,861,350	949,917,657	0	100,000,000	1,049,918,000	0,0079	1,726	0,0019	88,56	0,0017	1156	0,0013	31,58	0,0023
13	SUNGAI APIT	MENGKAPAN	711,056,307	265,355,688	976,411,995	0		976,412,000	0,0079	3,158	0,0036	11,04	0,0002	1915	0,0021	29,05	0,0021
14	SUNGAI APIT	SUNGAI RAWA	711,056,307	312,373,112	1,023,429,419	0		1,023,429,000	0,0093	1,188	0,0013	241,58	0,0046	1056	0,0011	31,80	0,0023
15	SUNGAI APIT	PENYENGAT	711,056,307	257,500,992	968,557,299	58,209,861	100,000,000	1,126,767,000	0,0077	1,925	0,0022	52,76	0,0010	1707	0,0019	37,34	0,0027
16	SUNGAI APIT	TELUK BATIL	711,056,307	279,246,663	990,302,970	49,533,528		1,039,836,000	0,0083	1,726	0,0019	87,93	0,0017	1554	0,0017	42,58	0,0030
17	SUNGAI APIT	BUNSUR	711,056,307	200,387,683	911,443,989	82,890,842	100,000,000	1,094,335,000	0,0060	1,375	0,0016	7,42	0,0001	1025	0,0011	44,51	0,0032
18	SUNGAI APIT	HARAPAN	711,056,307	193,338,751	904,395,058	0		904,395,000	0,0058	1,435	0,0016	16,32	0,0003	759	0,0008	42,30	0,0030
19	SUNGAI APIT	KAYU ARA PERMAI	711,056,307	187,219,679	898,275,986	66,641,100		964,917,000	0,0056	1,027	0,0012	21,88	0,0004	1062	0,0012	40,11	0,0029
20	SUNGAI APIT	RAWA MEKAR JAYA	711,056,307	268,550,439	979,606,745	0		979,607,000	0,0080	1,083	0,0012	164,31	0,0031	695	0,0008	41,08	0,0029
21	MINAS	MINAS TIMUR	711,056,307	353,205,899	1,064,262,206	77,253,677		1,141,516,000	0,0106	4,013	0,0045	140,69	0,0027	1868	0,0020	18,66	0,0013
22	MINAS	MINAS BARAT	711,056,307	636,125,274	1,347,181,581	0		1,347,182,000	0,0190	6,766	0,0076	302,88	0,0057	3339	0,0036	28,17	0,0020
23	MINAS	MANDI ANGIN	711,056,307	374,249,439	1,085,305,745	84,116,313		1,169,422,000	0,0112	3,033	0,0034	146,56	0,0028	1923	0,0021	40,53	0,0029
24	MINAS	RANTAU BERTUAH	711,056,307	250,436,267	961,492,574	59,729,445		1,021,222,000	0,0075	2,020	0,0023	93,93	0,0018	856	0,0009	34,91	0,0025
25	TUALANG	TUALANG	711,056,307	1,058,565,316	1,769,621,623	118,821,645		1,888,443,000	0,0316	18,758	0,0212	32,41	0,0006	6618	0,0072	37,26	0,0027
26	TUALANG	PINANG SEBATANG	711,056,307	336,734,963	1,047,791,270	58,234,371		1,106,026,000	0,0101	3,800	0,0043	39,94	0,0008	2273	0,0025	35,66	0,0026
27	TUALANG	MAREKAN	711,056,307	257,987,612	969,043,919	0		969,044,000	0,0077	3,787	0,0043	14,19	0,0003	1149	0,0012	26,84	0,0019
28	TUALANG	PINANG SEBATANG TIMUR	711,056,307	655,278,846	1,366,335,153	0		1,366,335,000	0,0196	11,144	0,0126	37,28	0,0007	3482	0,0038	35,22	0,0025
29	TUALANG	PINANG SEBATANG BARAT	711,056,307	382,463,325	1,093,519,632	62,793,122		1,156,313,000	0,0114	5,712	0,0064	20,96	0,0004	2211	0,0024	30,56	0,0022
30	TUALANG	MAREKAN BARAT	711,056,307	283,198,814	994,255,121	0		994,255,000	0,0085	3,664	0,0041	28,31	0,0005	1249	0,0014	34,06	0,0024
31	TUALANG	PERAWANG BARAT	711,056,307	1,437,293,540	2,148,349,847	77,327,205		2,225,677,000	0,0430	31,113	0,0351	46,89	0,0009	5139	0,0056	19,16	0,0014

1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	TUALANG	TUALANG TIMUR	711,056,307	316,341,038	1,027,397,344	51,224,678	100,000,000	1,178,622,000	0.0095	4,683	0.0053	9.75	0.0002	1006	0.0011	40.43	0.0029
33	SUNGAI MANDAU	MUARA KELANTAN	711,056,307	157,827,573	868,883,880	71,395,927		940,280,000	0.0047	1,400	0.0016	21.98	0.0004	623	0.0007	28.58	0.0020
34	SUNGAI MANDAU	TELUK LANCANG	711,056,307	134,950,489	846,006,796	0		846,007,000	0.0040	312	0.0004	10.61	0.0002	156	0.0002	46.29	0.0033
35	SUNGAI MANDAU	SUNGAI SELODANG	711,056,307	279,309,094	990,365,401	91,518,157		1,081,884,000	0.0083	1,365	0.0015	198.06	0.0037	537	0.0006	34.59	0.0025
36	SUNGAI MANDAU	OLAK	711,056,307	174,748,593	885,804,899	50,293,320		936,098,000	0.0052	1,412	0.0016	20.51	0.0004	515	0.0006	37.49	0.0027
37	SUNGAI MANDAU	LUBUK JERING	711,056,307	191,400,482	902,456,788	0		902,457,000	0.0057	1,658	0.0019	19.8	0.0004	344	0.0004	43.35	0.0031
38	SUNGAI MANDAU	MUARA BUNGKAL	711,056,307	182,879,036	893,935,343	0		893,935,000	0.0055	1,325	0.0015	18.39	0.0003	496	0.0005	43.11	0.0031
39	SUNGAI MANDAU	LUBUK UMBUT	711,056,307	148,189,981	859,246,287	0		859,246,000	0.0044	799	0.0009	23.44	0.0004	297	0.0003	38.60	0.0028
40	SUNGAI MANDAU	BENCAH UMBAI	711,056,307	234,617,992	945,674,299	0		945,674,000	0.0070	657	0.0007	127.82	0.0024	271	0.0003	49.72	0.0036
41	SUNGAI MANDAU	TASIK BETUNG	711,056,307	164,932,115	875,988,421	0	100,000,000	975,988,000	0.0049	915	0.0010	27.58	0.0005	266	0.0003	43.14	0.0031
42	DAYUN	DAYUN	711,056,307	1,250,724,624	1,961,780,930	112,792,329		2,074,573,000	0.0374	8,621	0.0097	1206.6	0.0228	2652	0.0029	26.91	0.0019
43	DAYUN	BANJAR SEMINAI	711,056,307	271,516,047	982,572,353	0		982,572,000	0.0081	3,221	0.0036	16.28	0.0003	1435	0.0016	36.53	0.0026
44	DAYUN	TELUK MERBAU	711,056,307	202,992,924	914,049,231	0		914,049,000	0.0061	2,198	0.0025	15.89	0.0003	797	0.0009	33.83	0.0024
45	DAYUN	MERANGKAI	711,056,307	154,778,307	865,834,614	67,106,779		932,941,000	0.0046	1,261	0.0014	8.84	0.0002	638	0.0007	32.75	0.0023
46	DAYUN	LUBUK TILAN	711,056,307	158,698,374	869,754,680	0		869,755,000	0.0047	1,179	0.0013	10.99	0.0002	434	0.0005	38.21	0.0027
47	DAYUN	BERUMBUNG BARU	711,056,307	212,241,639	923,297,946	0		923,298,000	0.0063	2,188	0.0025	17.22	0.0003	882	0.0010	36.21	0.0026
48	DAYUN	PANGKALAN MAKMUR	711,056,307	237,233,118	948,289,424	0		948,289,000	0.0071	2,549	0.0029	9.23	0.0002	1108	0.0012	39.64	0.0028
49	DAYUN	BUANA MAKMUR	711,056,307	171,494,288	882,550,594	0		882,551,000	0.0051	1,523	0.0017	9.95	0.0002	591	0.0006	36.02	0.0026
50	DAYUN	SUKA MULYA	711,056,307	147,681,274	858,737,581	75,292,924	100,000,000	1,034,031,000	0.0044	931	0.0011	10.86	0.0002	514	0.0006	36.34	0.0026
51	DAYUN	SAWIT PERMAI	711,056,307	268,360,214	979,416,521	59,386,313	100,000,000	1,138,803,000	0.0080	4,584	0.0052	23.41	0.0004	907	0.0010	19.83	0.0014
52	DAYUN	SIALANG SAKTI	711,056,307	221,018,303	932,074,609	0		932,075,000	0.0066	3,398	0.0038	18.71	0.0004	980	0.0011	18.90	0.0014
53	KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	711,056,307	219,700,518	930,756,825	0		930,757,000	0.0066	1,833	0.0021	97.35	0.0018	787	0.0009	25.16	0.0018
54	KERINCI KANAN	KERINCI KIRI	711,056,307	212,000,757	923,057,063	0		923,057,000	0.0063	2,062	0.0023	56.21	0.0011	781	0.0008	29.31	0.0021
55	KERINCI KANAN	BUANA BAKTI	711,056,307	165,044,146	876,100,452	0		876,100,000	0.0049	1,826	0.0021	12.79	0.0002	350	0.0004	31.45	0.0022
56	KERINCI KANAN	BUKIT HARAPAN	711,056,307	147,739,306	858,795,612	0		910,682,000	0.0044	1,438	0.0016	13.16	0.0002	538	0.0006	27.39	0.0020
57	KERINCI KANAN	KUMBARA UTAMA	711,056,307	160,810,511	871,866,818	51,886,432	100,000,000	971,867,000	0.0048	1,816	0.0020	11.72	0.0002	416	0.0005	29.12	0.0021
58	KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	711,056,307	190,966,047	902,022,353	0	100,000,000	1,002,022,000	0.0057	2,252	0.0025	30.68	0.0006	864	0.0009	23.02	0.0016
59	KERINCI KANAN	SIMPANG PERAK JAYA	711,056,307	230,610,517	941,666,824	0		941,667,000	0.0069	3,222	0.0036	12.78	0.0002	1010	0.0011	26.80	0.0019
60	KERINCI KANAN	BUATAN BARU	711,056,307	212,935,469	923,991,775	0		923,992,000	0.0064	2,331	0.0026	15.7	0.0003	775	0.0008	36.27	0.0026
61	KERINCI KANAN	GABUNG MAKMUR	711,056,307	186,967,458	898,023,764	0		957,802,000	0.0056	1,476	0.0017	10.14	0.0002	382	0.0004	46.35	0.0033
62	KERINCI KANAN	JATI MULYA	711,056,307	147,718,154	858,774,461	0		858,774,000	0.0044	1,309	0.0015	10.9	0.0002	539	0.0006	30.00	0.0021
63	KERINCI KANAN	SEMINAI	711,056,307	215,336,300	926,392,606	0		926,393,000	0.0064	2,574	0.0029	18.84	0.0004	732	0.0008	33.26	0.0024
64	KERINCI KANAN	DELIMA JAYA	711,056,307	121,063,832	832,120,139	0		832,120,000	0.0036	1,008	0.0011	8.93	0.0002	312	0.0003	27.58	0.0020
65	BUNGA RAYA	BUNGA RAYA	711,056,307	338,825,680	1,049,881,987	51,910,941		1,101,793,000	0.0101	5,584	0.0063	8.79	0.0002	1809	0.0020	23.67	0.0017
66	BUNGA RAYA	JATI BARU	711,056,307	321,039,456	1,032,095,762	61,935,292		1,094,031,000	0.0096	4,099	0.0046	48.85	0.0009	1305	0.0014	36.72	0.0026
67	BUNGA RAYA	JAYA PURA	711,056,307	326,103,069	1,037,159,376	76,126,244		1,113,286,000	0.0097	4,192	0.0047	89.15	0.0017	1307	0.0014	26.67	0.0019
68	BUNGA RAYA	KEMUNING MUDA	711,056,307	233,856,813	944,913,119	82,817,314		1,027,730,000	0.0070	2,836	0.0032	10.25	0.0002	915	0.0010	36.36	0.0026
69	BUNGA RAYA	BUANTAN LESTARI	711,056,307	268,684,659	979,740,965	0		979,741,000	0.0080	2,780	0.0031	3.71	0.0001	1511	0.0016	44.48	0.0032
70	BUNGA RAYA	TUAH INDRAPURA	711,056,307	276,952,090	988,008,396	0	100,000,000	1,088,008,000	0.0083	3,245	0.0037	19.93	0.0004	1361	0.0015	38.58	0.0028

1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71	BUNGA RAYA	LANGSAT PERMAI	711,056,307	160,832,248	871,888,554	69,533,211		941,422,000	0.0048	1,560	0.0018	7.32	0.0001	492	0.0005	33.18	0.0024
72	BUNGA RAYA	TEMUSAI	711,056,307	182,487,224	893,543,531	92,008,345		985,552,000	0.0055	1,422	0.0016	46.7	0.0009	587	0.0006	32.54	0.0023
73	BUNGA RAYA	DAYANG SURI	711,056,307	158,637,174	869,693,481	111,566,858		981,260,000	0.0047	1,182	0.0013	9.77	0.0002	627	0.0007	35.53	0.0025
74	BUNGA RAYA	SUAK MERAMBAL	711,056,307	159,081,547	870,137,854	0		870,138,000	0.0048	898	0.0010	11.72	0.0002	662	0.0007	39.15	0.0028
75	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	711,056,307	367,168,636	1,078,224,942	0		1,078,225,000	0.0110	5,462	0.0062	89.98	0.0017	1268	0.0014	24.16	0.0017
76	KOTO GASIB	KUALA GASIB	711,056,307	265,614,288	976,670,594	0		976,671,000	0.0079	2,675	0.0030	83.24	0.0016	1299	0.0014	27.02	0.0019
77	KOTO GASIB	TELUK RIMBA	711,056,307	188,349,631	899,405,937	0		899,406,000	0.0056	697	0.0008	67.61	0.0013	592	0.0006	40.82	0.0029
78	KOTO GASIB	BUATAN I	711,056,307	259,385,540	970,441,846	0		970,442,000	0.0078	1,534	0.0017	110.6	0.0021	1112	0.0012	38.02	0.0027
79	KOTO GASIB	BUATAN II	711,056,307	311,004,809	1,022,061,115	0		1,022,061,000	0.0093	3,491	0.0039	85.19	0.0016	1703	0.0018	26.46	0.0019
80	KOTO GASIB	SENGKEMANG	711,056,307	230,571,916	941,628,223	0		941,628,000	0.0069	1,603	0.0018	69.85	0.0013	853	0.0009	39.61	0.0028
81	KOTO GASIB	RANTAU PANJANG	711,056,307	198,310,724	909,367,031	0		909,367,000	0.0059	1,516	0.0017	107.18	0.0020	498	0.0005	23.01	0.0016
82	KOTO GASIB	EMPANG PANDAN	711,056,307	248,752,869	959,809,176	71,910,624		1,031,720,000	0.0074	2,862	0.0032	15.63	0.0003	1108	0.0012	37.82	0.0027
83	KOTO GASIB	KERANJI GUGUH	711,056,307	215,028,674	926,084,980	0		926,085,000	0.0064	2,060	0.0023	13.22	0.0003	956	0.0010	39.33	0.0028
84	KOTO GASIB	SRI GEMILANG	711,056,307	182,617,511	893,673,817	91,959,326	100,000,000	1,085,633,000	0.0055	655	0.0007	35.17	0.0007	288	0.0003	52.29	0.0037
85	KOTO GASIB	TASIK SEMINAI	711,056,307	165,228,802	876,285,109	53,724,638		930,010,000	0.0049	1,272	0.0014	8.07	0.0002	622	0.0007	37.39	0.0027
86	KANDIS	BELUTU	711,056,307	509,801,897	1,220,858,203	0		1,220,858,000	0.0152	7,233	0.0082	64.8	0.0012	2634	0.0029	41.74	0.0030
87	KANDIS	KANDIS	711,056,307	472,937,013	1,183,993,320	0		1,183,993,000	0.0141	7,867	0.0089	44.45	0.0008	2591	0.0028	22.37	0.0016
88	KANDIS	SAM-SAM	711,056,307	847,007,806	1,558,064,113	0		1,558,064,000	0.0253	8,258	0.0093	590	0.0112	1467	0.0016	45.16	0.0032
89	KANDIS	BEKALAR	711,056,307	418,688,839	1,129,745,146	49,165,887		1,178,911,000	0.0125	5,338	0.0060	64.41	0.0012	1730	0.0019	47.40	0.0034
90	KANDIS	JAMBAI MAKMUR	711,056,307	327,932,052	1,038,988,359	59,778,464		1,098,767,000	0.0098	3,857	0.0044	72.24	0.0014	1154	0.0013	39.52	0.0028
91	KANDIS	SUNGAI GONDANG	711,056,307	260,591,330	971,647,636	59,778,464	100,000,000	1,131,426,000	0.0078	2,175	0.0025	53.72	0.0010	1387	0.0015	39.29	0.0028
92	KANDIS	PENCING BEKULO	711,056,307	295,640,705	1,006,697,012	50,611,942		1,057,309,000	0.0088	2,762	0.0031	6.66	0.0001	1908	0.0021	49.22	0.0035
93	KANDIS	LIBO JAYA	711,056,307	455,601,759	1,166,658,066	0		1,166,658,000	0.0136	7,028	0.0079	25.52	0.0005	2220	0.0024	39.01	0.0028
94	LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	711,056,307	375,471,903	1,086,528,210	109,581,596		1,196,110,000	0.0112	6,234	0.0070	81.19	0.0015	1562	0.0017	13.31	0.0010
95	LUBUK DALAM	RAWANG KAO	711,056,307	240,850,872	951,907,178	67,327,364		1,019,235,000	0.0072	2,353	0.0027	54.62	0.0010	1023	0.0011	33.52	0.0024
96	LUBUK DALAM	SRI GADING	711,056,307	234,418,865	945,475,172	110,292,369		1,085,768,000	0.0070	2,493	0.0028	13.26	0.0003	1141	0.0012	37.78	0.0027
97	LUBUK DALAM	SIALANG BARU	711,056,307	249,912,638	960,968,945	0		960,969,000	0.0075	3,033	0.0034	16.55	0.0003	1232	0.0013	33.48	0.0024
98	LUBUK DALAM	SIALANG PALAS	711,056,307	202,718,541	913,774,847	63,013,707		976,789,000	0.0061	2,123	0.0024	10.58	0.0002	1070	0.0012	32.16	0.0023
99	LUBUK DALAM	EMPANG BARU	711,056,307	210,180,862	921,237,168	75,488,999		996,726,000	0.0063	2,147	0.0024	16.21	0.0003	900	0.0010	35.99	0.0026
100	LUBUK DALAM	RAWANG KAO BARAT	711,056,307	166,980,326	878,036,632	59,729,445		937,766,000	0.0050	1,863	0.0021	32.98	0.0006	684	0.0007	21.26	0.0015
101	SABAK AUH	BANDAR SUNGAI	711,056,307	194,482,931	905,539,237	59,704,936	100,000,000	1,065,244,000	0.0058	1,325	0.0015	11.67	0.0002	1227	0.0013	38.64	0.0028
102	SABAK AUH	REMPAK	711,056,307	170,234,426	881,290,732	0		881,291,000	0.0051	2,070	0.0023	7.92	0.0001	666	0.0007	26.26	0.0019
103	SABAK AUH	BELADING	711,056,307	178,443,697	889,500,004	0		889,500,000	0.0053	1,452	0.0016	8.84	0.0002	581	0.0006	40.49	0.0029
104	SABAK AUH	SUNGAI TENGAH	711,056,307	226,742,063	937,798,370	59,508,860		997,307,000	0.0068	2,264	0.0026	29.31	0.0006	934	0.0010	37.08	0.0027
105	SABAK AUH	LAKSAMANA	711,056,307	210,100,149	921,156,436	0		921,156,000	0.0063	1,966	0.0022	12.54	0.0002	978	0.0011	38.60	0.0028
106	SABAK AUH	SABAK PERMAI	711,056,307	194,376,147	905,432,454	67,278,345		972,711,000	0.0058	1,690	0.0019	12.97	0.0002	820	0.0009	38.67	0.0028
107	SABAK AUH	BANDAR PEDADA	711,056,307	130,628,493	841,684,800	0		841,685,000	0.0039	1,429	0.0016	3.67	0.0001	506	0.0005	23.38	0.0017
108	SABAK AUH	SELAT GUNTUNG	711,056,307	167,753,673	878,809,980	0		878,810,000	0.0050	1,258	0.0014	11.6	0.0002	603	0.0007	38.02	0.0027
109	MEMPURA	KOTA RINGIN	711,056,307	208,984,283	920,040,590	81,812,428		1,001,853,000	0.0062	1,774	0.0020	45.79	0.0009	824	0.0009	34.70	0.0025

1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
110	MEMPURA	PALUH	711,056,307	232,858,829	943,915,136	0		943,915,000	0.0070	1,885	0.0021	10.48	0.0002	1521	0.0017	41.69	0.0030
111	MEMPURA	BENTENG HILIR	711,056,307	204,775,605	915,831,912	0		915,832,000	0.0061	2,320	0.0026	15.08	0.0003	709	0.0008	34.20	0.0024
112	MEMPURA	BENTENG HULU	711,056,307	254,130,300	965,186,607	0		965,187,000	0.0076	3,767	0.0043	25.04	0.0005	1599	0.0017	15.84	0.0011
113	MEMPURA	KAMPUNG TENGAH	711,056,307	159,671,919	870,728,225	0		870,728,000	0.0048	540	0.0006	104.75	0.0020	195	0.0002	27.51	0.0020
114	MEMPURA	MEREMPAN HILIR	711,056,307	420,446,076	1,131,502,383	0		1,131,502,000	0.0126	2,260	0.0026	329.02	0.0062	1005	0.0011	37.67	0.0027
115	MEMPURA	TELUK MEREMPAN	711,056,307	285,682,611	996,738,918	0		996,739,000	0.0085	821	0.0009	224.68	0.0043	408	0.0004	40.75	0.0029
116	PUSAKO	SUNGAI BERBARI	711,056,307	150,961,270	862,017,576	0		862,018,000	0.0045	963	0.0011	78.16	0.0015	379	0.0004	21.44	0.0015
117	PUSAKO	SUNGAI LIMAU	711,056,307	219,393,597	930,449,904	0		930,450,000	0.0066	1,235	0.0014	87.93	0.0017	718	0.0008	38.01	0.0027
118	PUSAKO	DOSAN	711,056,307	199,482,305	910,538,612	0		910,539,000	0.0060	1,460	0.0016	39.08	0.0007	554	0.0006	41.56	0.0030
119	PUSAKO	BENAYAH	711,056,307	164,840,851	875,897,158	0		875,897,000	0.0049	1,737	0.0020	30.77	0.0006	1039	0.0011	17.55	0.0013
120	PUSAKO	PEBADARAN	711,056,307	139,223,166	850,279,473	0		850,279,000	0.0042	928	0.0010	14.65	0.0003	678	0.0007	29.36	0.0021
121	PUSAKO	DUSUN PUSAKA	711,056,307	183,526,825	894,583,131	0		894,583,000	0.0055	903	0.0010	21.49	0.0004	467	0.0005	49.66	0.0036
122	PUSAKO	PERINCIT	711,056,307	118,760,766	829,817,072	0		829,816,300	0.0035	619	0.0007	13.67	0.0003	432	0.0005	29.68	0.0021
JUNILAH			86,748,869,410	33,460,278,201	120,209,147,611	3,717,808,689	1,400,000,000	125,326,956,300	1	354,391	0	7,923	0	138,146	0	4,195	0

BUPATI SIAK

ALFEDRI